

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang statistik dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang persandian yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

3. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika statistik, persandian dan tata kelola e-government.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika statistik, persandian dan tata kelola e-government; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan tata kelola e-government;
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Struktural pada bagan Struktural organisasi, antara lain sebagai berikut :

#### **Kepala Dinas**

##### **Tugas Pokok Kepala Dinas :**

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian ;

##### **Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tik, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang tik, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tik, telematika dan e-government, pengelolaan informasi dan media komunikasi publik, pengembangan SDM dan kemitraan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan persandian;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tugas Pokok Sekretaris :**

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;

**Fungsi :**

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan kepegawaian.

**Fungsi :**

1. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
2. Penyelenggaraan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :**

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

**Fungsi :**

1. Penyelenggaraan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
2. Penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik adalah :**

1. Kepala Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pengelolaan media komunikasi publik;

**Fungsi :**

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pengelolaan media komunikasi publik;
2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik dan statistik serta pengelolaan media komunikasi publik;
3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik dan statistik serta pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pengelolaan Layanan Aspirasi Publik :**

1. Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Aspirasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan layanan aspirasi publik;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik :**

1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi public dan statistik

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pengelolaan informasi publik dan statistik
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi publik dan statistik;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi publik dan statistik;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik :**

1. Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Aspirasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan media komunikasi publik;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pengelolaan media komunikasi publik;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan media komunikasi publik;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok Kepala Bidang TIK, Telematika dan E-Government :**

1. Kepala Bidang TIK, Telematika dan E-Government mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang teknologi informasi dan komunikasi, telematika dan e-government;

**Fungsi :**

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang tik, telematika dan pengelolaan e-government;
2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan dibidang tik, telematika dan pengelolaan e-government;
3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelapora dibidang tik, telematika dan pengelolaan e-government;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok Seksi Infrastruktur TIK :**

1. Kepala Seksi Infrastruktur TIK mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang TIK, Telematika dan E-Government dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur TIK;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang infrastruktur tik
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tik
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tik
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Tugas Pokok Seksi Aplikasi Telematika :**

1. Kepala Seksi Aplikasi Telematika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang TIK, Telematika dan E-Government dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Aplikasi Telematika;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang aplikasi telematika;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang aplikasi telematika;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang aplikasi telematika;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok Seksi Tata Kelola E-Government :**

1. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang TIK, Telematika dan E-government dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang tata kelola e-government;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang e-government;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang e-government;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaann kebijakan teknis dibidang e-government;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian :**

1. Kepala Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang penguatan kapasitas SDM komunikasi publik, hubungan media dan persandian;

**Fungsi :**

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan kapasitas SDM komunikasi publik, hubungan media dan persandian;
2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan dibidang penguatan kapasitas SDM komunikasi publik, hubungan media dan persandian;
3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penguatan kapasitas SDM komunikasi publik, hubungan media dan persandian;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok Seksi Pengembangan SDM :**

1. Kepala Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik dan TIK;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang penguatan kapasitas SDM Komunikasi dan Media Komuikasim Publik;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penguatan kapasitas SDM Komunikasi Publik dan TIK serta Persandia, Statistik, Persandian dan Penyelenggaraan SKPD;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penguatan kapasitas SDM Komunikasi Publik dan TIK;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**Tugas Pokok Seksi Kemitraan :**

1. Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di kemitraan komunikasi publik;

**Fungsi :**

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang kemitraan komunikasi publik;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kemitraan komunikasi publik;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kemitraan komunikasi publik;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok Seksi Persandian :**

1. Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian;

**Fungsi :**

- Penyusunan bahan kebijakan dibidang persandian;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang persandian;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang persandian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengelolaan Layanan Aspirasi Publik
  - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik;
  - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4. Bidang TIK, Telematika dan E-Government, membawahkan :
  - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - 2) Seksi Aplikasi Telematika;
  - 3) Seksi Tata Kelola E-Government;
5. Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengembangan SDM;
  - 2) Seksi Kemitraan;
  - 3) Seksi Persandian
6. UPT Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## **1.4 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut ini.

### **Bab I – Pendahuluan,**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dan struktur organisasi.

### **Bab II – Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2017 - 2021 dan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2019.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat serta analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.

### **Bab IV – Penutup,**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis 2016-2021.**

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar selama 5 (lima) tahun yang mendiskripsikan program dan kegiatan prioritas secara terukur dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
2. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Tersusunnya berbagai kebijakan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dalam waktu satu sampai lima tahun ke depan.
4. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
5. Untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan sebagai pedoman pelaksanaan program tahunan sampai lima tahunan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini, dan memprediksi keadaan yang akan datang, dengan tetap mengemban amanah untuk mewujudkan masyarakat Kutai Barat yang sejahtera, cerdas, sehat dan produktif berbasiskan ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat perlu secara terus menerus mengembangkan sumber daya aparatur agar dapat menjalankan tugas secara profesional.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat untuk mempersiapkan diri dengan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja untuk menuju perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang ingin dicapai sesuai program kerja.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat untuk lebih mempersiapkan diri agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sebagaimana diketahui bersama, Visi Kutai Barat 2016 - 2021 adalah **“Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan**

**Kualitas Sumber Daya Manusia**". Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kutai Barat yang telah dibentuk pada Tahun 2016 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Misi Kabupaten Kutai Barat yang ke 1, yaitu; Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah kutai barat;

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah menyusun Perencanaan Strategis tahun 2017 – 2021 yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 – 2021, guna mewujudkan potensi pelayanan yang menjadi Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi secara spesifik dititik beratkan pada masyarakat perdesaan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan adanya seluruh aparat khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat yang berkepentingan dapat menyusun, melaksanakan dan mengetahui program-program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 – 2021.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, di dalam dokumen Renstra juga telah dirumuskan 3 (tiga) tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
- b. Peningkatan pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Peningkatan sistem persandian daerah.



Tujuan dicanangkan untuk jangka 5 (Tahun). Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dalam waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas : SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi dan sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

Ketiga tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan kedalam sasaran yang lebih konkret sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik.
2. Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi.
3. Meningkatnya sistem persandian daerah.

### **2.3 Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka melaksanakan ke 3 tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika di atas, maka ditempuh beberapa strategi sebagai berikut di bawah ini.

1. Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi dan pengawasan pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill aparatur serta peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan.
3. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas.

## **2.4 Perjanjian Kinerja**

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada lampiran 2.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

Untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sasaran tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Ordinal**

<b>No</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil
2.	Nilai 70 < 85	Berhasil
3.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil
4.	Nilai < 55	Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil analisis pengukuran terhadap 3 sasaran tersebut dibawah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 3 sasaran yang ada dengan rata – rata tingkat keberhasilan diatas 100% dengan kategori Sangat Berhasil (nilai 85 s.d 100).

Berdasarkan hasil analisis perhitungan sasaran dan indikator kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi. *Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 sebesar 144% atau termasuk katagori "SANGAT BERHASIL"*

Capain ini didapat berdasarkan penghitungan dari 3 sasaran dan 7 indikator, melihat hasil capaian kinerja yang cukup tinggi ini menandakan kinerja yang sangat tinggi namun akan menjadi bahan evaluasi dimana ditemukan capaian yang jauh melebihi target yang bisa terjadi karena kesalahan dalam menentukan target yang terlalu rendah sehingga pada saat dilakukan pengukuran kinerja didapatkan realisasi yang jauh melebihi target.

Walaupun terdapat 2 indikator kinerja sasaran yang pencapaiannya kurang berhasil namun ditutupi dengan pencapaian 3 indikator sasaran yang sangat berhasil dimana terdapat capain kinerja yang melebihi target, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan penghitungan pengukuran kinerja dianggap Sangat Berhasil.

Secara rinci capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan dalam kinerja tahun 2019 disampaikan dalam uraian berikut ini.

**Tabel 3.1.2**  
**Kategori Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

No	Kategori Pencapaian Sasaran	Jumlah Sasaran
1	Sangat Berhasil	3
2	Berhasil	0
3	Cukup Berhasil	0
4	Kurang Berhasil	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Capaian Indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

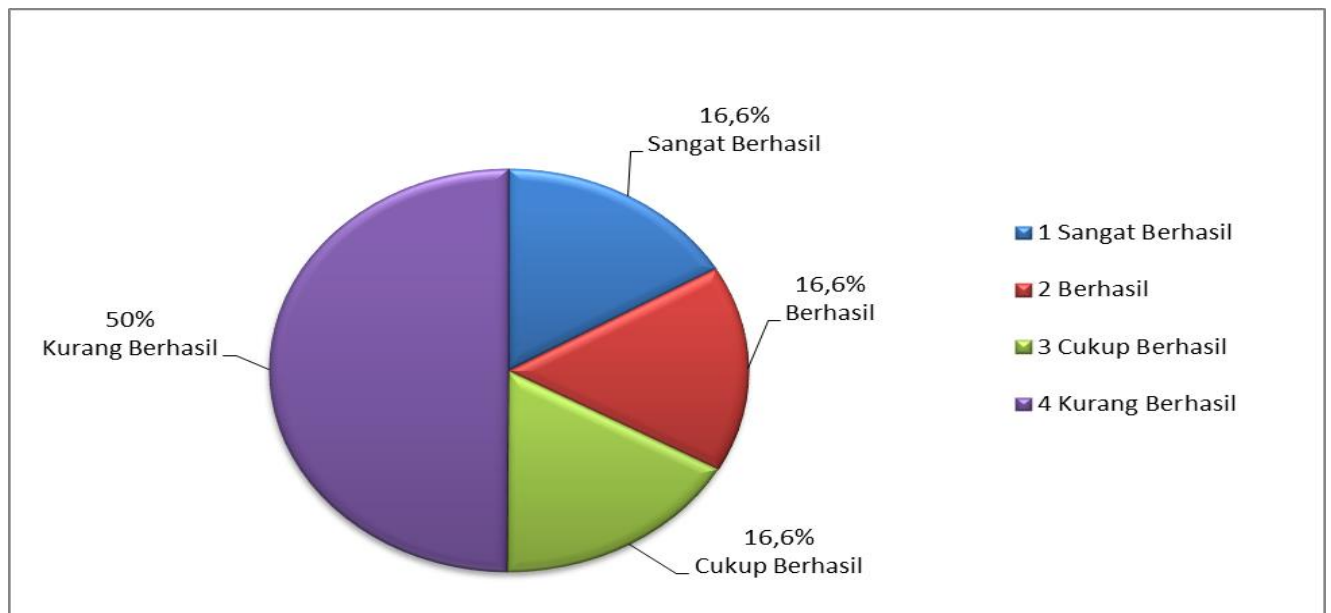
1. Sasaran pertama yaitu **Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik**. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan 5 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 126% dengan kategori **Sangat Berhasil**, namun ada sebagian indikator kinerja yang tidak mencapai target dikarenakan tidak tersedianya anggaran.

**Tabel 3.2.1**  
**Prosentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi			
1.	Jumlah kerjasama media cetak, media elektronik dan kemitraan lintas sektoral.	Kegiatan	Koran/Majallah /Tabloid = 2	Koran/Majallah /Tabloid = 3	150%	50%	Kurang Berhasil
			TV = 2	TV = 1	50%		
			Radio = 3	Radio = 0	0%		
			OPD/Instansi Terkait = 16	OPD/Instansi Terkait = 0	0%		
2.	Jumlah liputan informasi publik dan produksi.	Liputan dan Produksi	Liputan = 150	Liputan = 408	272%	411%	Sangat Berhasil
			Produksi = 6	Produksi = 33	550%		
3.	Jumlah layanan informasi publik dan statistik.	Aplikasi	Aplikasi = 2	Aplikasi = 0	0%	33%	Kurang Berhasil
		Buku/Eks	Buku = 60	Buku = 60	100%		
		Kelompok	Kelompok = 5	Kelompok = 0	0%		
4.	Presentase jumlah aduan yang masuk dari masyarakat yang ditindaklanjuti.	Aduan	Aduan = 7	Aduan = 4	57%	57%	Cukup Berhasil

5.	Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan informasi.	Orang	10 Orang	8 Orang	80%	80%	Berhasil
<b>Tingkat Keberhasilan</b>					114%	126%	Sangat Berhasil

Grafik Presentase Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Sasaran 1



Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 1 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran atau 16,6% dengan kategori Sangat Berhasil (Nilai 85 s.d 100).
  - Jumlah liputan informasi publik dan produksi dengan tingkat capaian sebesar 411%.
- b. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran atau 16,6% dengan kategori Berhasil (Nilai 70 < 85).

- Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan informasi dengan tingkat capaian sebesar 80%.
- c. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran atau 16,6% dengan kategori Cukup Berhasil (Nilai 55 < 70).
- Presentase jumlah aduan yang masuk dari masyarakat yang ditindaklanjuti dengan tingkat capaian sebesar 57%.
- d. Sebanyak 2 Indikator Kinerja Sasaran atau 50% dengan kategori Kurang Berhasil (Nilai < 55).
- Jumlah kerjasama media cetak, media elektronik dan kemitraan lintas sektoral dengan tingkat capaian sebesar 50%.
  - Jumlah layanan informasi publik dan statistik dengan tingkat capaian sebesar 33%.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 2 indikator yang kurang berhasil yaitu :

1. Jumlah kerjasama media cetak, media elektronik dan kemitraan lintas sektoral.
  - Target tahun 2019 adalah TV = 2, hanya terpenuhi 1 TV disebabkan Anggaran hanya cukup untuk 1 kali kerjasama dengan media Televisi. Solusinya anggaran akan ditambah.
  - Target tahun 2019 adalah Rradio = 3 tidak dapat terpenuhi disebabkan tidak tersedia anggaran pada tahun 2019. Solusinya kegiatan menyesuaikan dengan anggaran/KUA PPAS yang tersedia.
  - Target tahun 2019 adalah 16 OPD/Instansi Terkait tidak dapat dipenuhi disebabkan Tidak tersedia anggaran pada

tahun 2019. Solusinya kegiatan menyesuaikan dengan anggaran/KUA PPAS yang tersedia.

2. Jumlah layanan informasi publik dan statistik.

- Target tahun 2019 adalah 2 Aplikasi tidak dapat terpenuhi disebabkan tidak tersedia anggaran pada tahun 2019. Solusinya kegiatan menyesuaikan dengan anggaran/KUA PPAS yang tersedia.
- Target tahun 2019 adalah 5 Kelompok tidak dapat terpenuhi disebabkan tidak tersedia anggaran pada tahun 2019. Solusinya kegiatan menyesuaikan dengan anggaran/KUA PPAS yang tersedia.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dapat disimpulkan bawa masih terdapat 1 indikator yang cukup berhasil dan perlu ditingkatkan lagi yaitu :

1. Presentase jumlah aduan yang masuk dari masyarakat yang ditindaklanjuti.
  - Target tahun 2019 adalah 7% Aduan, di dalam sasaran kegiatan target yang di tententukan sebanyak 100 aduan, total aduan yang masuk selama tahun 2019 sebanyak 16 aduan dan total aduan yang ditindaklanjuti sebanyak 4 aduan, permasalahan yang terjadi belum dilakukannya sosialisasi secara intensif baik kepada masyarakat maupun instansi. Solusinya Akan dianggarkan dana untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan instansi.



2. Sasaran ke dua yaitu **Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi**. Untuk menilai keberhasilan/ kegagalan sasaran ini menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 183% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

**Tabel 3.2.2**  
**Prosentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi			
1	Jumlah aplikasi e-government dan infrastruktur yang ada di pemerintah Kabupaten Kutai Barat.	Aplikasi dan Infrastruktur	Aplikasi = 2	Aplikasi = 3	150%	183%	Sangat Berhasil
			Infrastruktur = 1	Infrastruktur = 3	300%		
			Data Center = 1	Data Center = 1	100%		
<b>Tingkat Keberhasilan</b>					550%	183%	Sangat Berhasil

Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 2 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sebanyak 3 Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Terealisasi dengan kategori Sangat Berhasil (Nilai 85 s.d 100).

Target	Realisasi
Aplikasi = 2	Aplikasi = 3
Infrastruktur = 1	Infrastruktur = 3
Data Center = 1	Data Center = 1

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dapat disimpulkan bawa semua target dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak terdapat permasalahan dalam sasaran 2 tersebut.

**3. Sasaran ke tiga yaitu Meningkatkan Sistem Persandian Daerah.**

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan 1 indikator kinerja, dengan tingkat keberhasilan mencapai 123% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

**Tabel 3.2.3  
Prosentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		Jumlah Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi			
1	Presentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi.	Jumlah perangkat daerah	65%	319%	491%	123%	Sangat Berhasil
<b>Tingkat Keberhasilan</b>					491%	123%	Sangat Berhasil

Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 3 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Terealisasi dengan kategori Sangat Berhasil (Nilai 85 s.d 100).

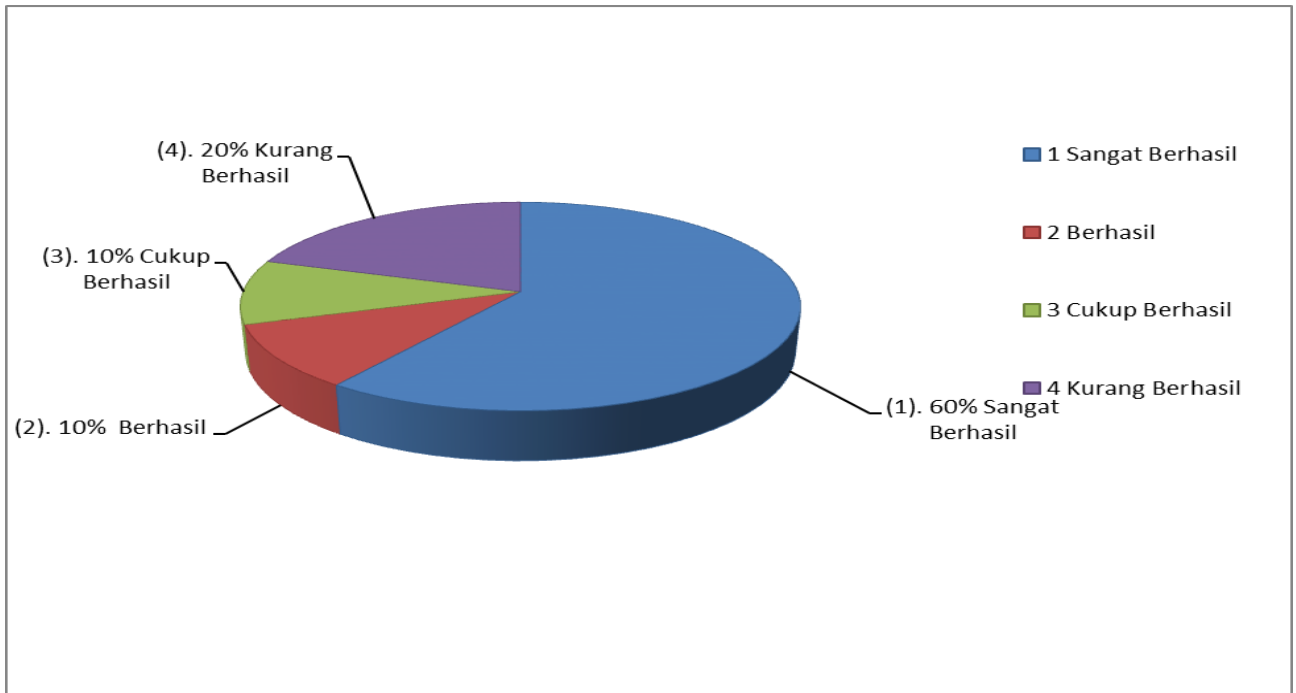
Target	65%
Realisasi	319%
Jumlah Realisasi	491%
Capaian	123%

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Sistem Persandian Daerah dapat dihitung dengan rumus sbb :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah di Kutai Barat}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak terdapat permasalahan dalam sasaran 3 tersebut.

## Grafik Presentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019



Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa :

A. Sebanyak 2 Indikator Kinerja Sasaran atau 20% dengan kategori Kurang Berhasil (Nilai < 55).

- Jumlah kerjasama media cetak, media elektronik dan kemitraan lintas sektoral dengan tingkat capaian sebesar 50%.
- Jumlah layanan informasi publik dan statistik dengan tingkat capaian sebesar 33%.

B. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran atau 10% dengan kategori Cukup Berhasil (Nilai 55 < 70).

- Presentase jumlah aduan yang masuk dari masyarakat yang ditindaklanjuti dengan tingkat capaian sebesar 57%.

C. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran atau 10% dengan kategori Berhasil (Nilai  $70 < 85$ ).

- Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan informasi dengan tingkat capaian sebesar 80%.

D. Sebanyak 3 Indikator Kinerja Sasaran atau 60% dengan kategori Sangat Berhasil (Nilai 85 s.d 100) .

- Presentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dengan tingkat capaian sebesar 123%.
- Jumlah liputan informasi publik dan produksi dengan tingkat capaian sebesar 411%.
- Jumlah aplikasi e-government dan infrastruktur yang ada di pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan tingkat capaian sebesar 183%.

Tingkat capaian Indikator Kinerja Sasaran sampai dengan tahun 2019 terhadap Target Kinerja akhir Renstra di Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjukkan di dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Dibandingkan Target Akhir Renstra**

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2019			TARGET AKHIR RENSTRA	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah Kerjasama media cetak, media elektronik dan kemitraan lintas sektoral	Kegiatan	Koran/Majallah /Tabloid = 2	Koran/Majallah /Tabloid = 3	150%	Koran/Majallah /Tabloid = 2	75%
			TV = 2	TV = 1	50%	TV = 2	25%
			Radio : 3	Radio : 0	0%	Radio : 3	0%
			OPD/Instansi terkait = 16	OPD/Instansi terkait = 0	0%	OPD/Instansi terkait = 16	0%
2	Jumlah liputan Informasi Publik dan Produksi	Liputan dan Produksi	Liputan = 150	Liputan = 408	272%	Liputan = 200	1.36%
			Produksi = 6	Produksi = 33	550%	Produksi = 8	68.75%
3	Jumlah layanan informasi publik dan statistik	Aplikasi, Buku/Eks, Kelompok	Aplikasi = 2	Aplikasi = 0	0%	Aplikasi = 2	0%
			Buku = 60 eks	Buku = 60 eks	100%	Buku = 120 eks	83.33%
			5 Kelompok	0 Kelompok	0%	10 Kelompok	0%
4	Presentase Jumlah aduan yang masuk dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Aduan	Aduan = 7%	Aduan = 4	57%	Aduan = 12%	4.75%
5	Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan informasi	Orang	10 Orang	8 Orang	80%	14 Orang	5.72%

6	Jumlah aplikasi e-government dan infrastruktur yang ada di pemerintah kabupaten kutai barat	Aplikasi dan Infrastruktur	Aplikasi = 2	Aplikasi = 3	150%	Aplikasi = 2	75%
			Infrastruktur = 1	Infrastruktur = 3	300%	Infrastruktur = 2	150%
			Data center = 1	Data center = 1	100%	-	100%
7	Presentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	Berita Sandi	65%	319%	123%	75%	1.64%



### 3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Kutai Barat Per Bidang Tahun 2019**

No	Bidang/Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	Rp. 3.241.023.539,00	Rp. 3.146.765.686,00	97,09%
2	Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik	Rp. 886.600.000,00	Rp. 762.231.450,00	85,97%
3	Bidang TIK, Telematika dan E-Government	Rp. 1.280.634.000,00	Rp. 1.141.454.342,00	89,13%
4	Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian	Rp. 787.000.000,00	Rp. 696.565.974,00	88,51%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 6.195.257.539,00</b>	<b>Rp. 5.747.017.452,00</b>	<b>92.76%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Tahun 2019. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 ini memberikan gambaran antara lain.

1. Secara umum Kinerja Diskominfo ditinjau dari pencapaian Indikator kinerja dapat di kategorikan Sangat berhasil mencapai seluruh target, walaupun ada beberapa Indikator Kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.
2. Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**, dimana 3 sasaran yang telah ditetapkan, mencapai rata - rata 144 persen.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi parameter penyelenggaraan tugas-tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government yang melibatkan semua Stakeholders.

Untuk kedepan diharapkan pencapaian sasaran dan hasil kerja dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program-program kerja dan hasil kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 20166 - 2021 dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat menuju masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang Sejahtera.